

MENELUSURI WACANA PEMBANGUNAN: MENCARI FORMAT PEMBANGUNAN KHAS NEGARA BERKEMBANG

Arif Hartono

Abstract

Development concepts in almost of developing countries have been being adopted from Western. Whereas, developing countries have different background and condition from Western in politics, economics, social, culture, history, etc. The implication of that condition, Western concepts couldn't solve the real problem of development in developing countries. A situation was aggravated by the existence of world relationship that give more advantage to Western/developpt countries.

The way out of that condition, developing countries must deconstruct their concept of development. Developing countries is different from Developed countries, so they must solve their problem with their way/concept. Essentially, developing countries must create the new paradigm of development.

To create the new paradigm, heterodoks and eclectic approach is very good method. Developing countries mustn't obey the grand theory. They may think or do 'everything' for development as they 'wish'.

Debat pemikiran pembangunan baik dalam perspektif konseptual maupun implementasinya seakan tak pernah berhenti; seirama dengan denyut nadi pembangunan di negara dunia ketiga yang tak kunjung usai atau bahkan tak akan pernah usai. Pergulatan ini terasa semakin hangat ketika kerangka konseptual yang mengikuti kaidah-kaidah 'konvensional' --yang tidak lain merupakan replikasi pembangunan model barat (*westernization*)-- pada realitanya banyak menemui kebuntuan di lapangan. Dalam perjalanannya, konsep-konsep pembangunan *made in* barat tersebut setelah diimplementasikan di banyak negara berkembang justru tidak sedikit yang menghasilkan paradoks-paradoks pembangunan --yang sangat mungkin *unpredictable* dan *uncontrollable*-- dengan bobot kompleksitas permasalahan yang tidak dapat dipandang enteng. Kebangkrutan ekonomi beberapa negara berkembang, terutama di Amerika latin dan

Afrika, dapat kita ambil sebagai contoh kasus. Pada Agustus 1982 Meksiko mengumumkan kebangkrutan perekonomiannya, sehingga tidak mampu lagi untuk membayar utangnya yang berjumlah US\$ 20 milyar. Fenomena ini kemudian berlanjut tahun 1983 dimana terjadi antrean panjang penjadwalan utang: Costa Rica (US\$ 200 juta), Sudan (US\$ 536 juta), Cuba (US\$ 415 juta), Togo (US\$ 300 juta), Zambia (US\$ 375 juta), Romania (US\$ 195 juta), Chili (US\$ 16 milyar), Peru (US\$ 400 juta), Ekuador (US\$ 200 juta), Malawi (US\$ 30 juta), Brazil (US\$ 2,7 milyar), Nigeria (US\$ 46 juta), Zaire (US\$ 1,6 milyar).¹

Dalam situasi yang lain, terdapat kecenderungan mensalahposisikan pembangunan sebagai sebuah dogma yang sakral dan harus dijunjung tinggi dan tak terbantahkan. Apapun dikalahkan demi yang namanya pembangunan, padahal terkadang dampaknya justru bertolak belakang dengan

tujuan pembangunan itu sendiri. Fenomena ini terkadang membuat orang pesimis, skeptis atau bahkan anti dengan yang namanya pembangunan. Tidak sedikit yang menafsirkan pembangunan tidak lebih dari sekadar penggusuran ataupun pelucutan hak-hak dan akses ekonomi 'si lemah' oleh 'si kuat'. Dengan menggunakan dogma pertumbuhan, kemajuan, modernisasi atau jargon-jargon lainnya, tidak sedikit rakyat kecil harus rela melepaskan kepemilikan asasinya demi pembangunan. Padahal dalam banyak kasus proses tersebut hanya dapat diakses dan dinikmati segelintir individu dari suatu komunitas yang sangat luas.

Tulisan ini mencoba memotret perkembangan pemikiran pembangunan beserta implementasi dan implikasinya di negara berkembang secara umum, untuk kemudian mencoba mencari/menawarkan pola berfikir dan bertindak yang dapat melahirkan pemikiran-pemikiran pembangunan alternatif yang khas negara berkembang. Lahirnya pemikiran-pemikiran alternatif tersebut diharapkan mampu menerobos *status quo* yang selama ini momentumnya berusaha 'dipertahankan' oleh negara-negara barat.

PERGESERAN MAKNA PEMBANGUNAN

Konsepsi pembangunan biasanya selalu dikaitkan atau bahkan diidentikkan dengan masalah pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Sebenarnya masing-masing pengertian tersebut mengandung makna, implikasi dan ramifikasi² yang berbeda satu dari yang lainnya.

Pertumbuhan ekonomi berkait erat dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Dapat dikatakan bahwa pertumbuhan menyangkut perkembangan yang berdimensi tunggal dan diukur dengan meningkatnya hasil produksi, dan pendapatan. Dalam pertumbuhan ekonomi, biasanya ditelaah dari proses produksi yang melibat-

kan sejumlah jenis produk dengan menggunakan sejumlah sarana produksi tertentu, (Djojohadikusumo, 1994:1)

Sementara itu, pembangunan ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk sesuatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Dengan demikian, pembangunan ekonomi mempunyai tiga sifat penting, yaitu: (1). suatu proses, yang berarti merupakan perubahan yang terjadi terus menerus (2). usaha untuk menaikkan tingkat pendapatan perkapita, dan (3). kenaikan pendapatan perkapita itu harus terus berlangsung dalam jangka panjang, (Sukimo, 1985:13)

Bila kita cermati dari kedua pengertian di atas (pertumbuhan dan pembangunan ekonomi) fokusnya terletak pada peningkatan pendapatan perkapita masyarakat. Para ahli ekonomi kemudian membedakan kedua pengertian dengan mengartikan istilah *pembangunan ekonomi* sebagai (1). peningkatan dalam pendapatan perkapita masyarakat, yaitu tingkat pertambahan GDP pada suatu tahun tertentu melebihi tingkat pertambahan penduduk, atau (2). perkembangan GDP yang berlaku dalam suatu masyarakat dibarengi oleh perombakan dan modernisasi dalam struktur ekonominya. Sedangkan pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan dalam GDP, tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil daripada tingkat pertumbuhan penduduk; atau apakah perubahan dalam struktur ekonomi berlaku atau tidak, (Sukimo, 1985: 14, dan Djojohadikusumo, 1994: 2)

Dalam perspektif tradisional, pembangunan diidentikkan dengan pertumbuhan ekonomi, yaitu upaya-upaya untuk meningkatkan pendapatan per kapita. Fenomena ini nampak dari pemikiran-pemikiran awal pembangunan yang tertuang dalam teori Harod-Domar, Arthur Lewis, WW Rostow, Hirschman, Rosenstein-Rodan, Nurkse, dan Leibenstein. Tidaklah menghe-

rankan bila pembangunan pada era ini dimaknai sebagai kapasitas perekonomian nasional, yang kondisi ekonomi awalnya kurang lebih berada dalam keadaan statis untuk jangka waktu yang lama, untuk menghasilkan dan mempertahankan tingkat kenaikan GNP sekitar 5 sampai 7 persen atau lebih setahun. Pada masa inipun kita dapat menemukan bahwa pembangunan juga umumnya dilihat dalam pengertian perubahan secara terencana struktur produksi dan penciptaan lapangan pekerjaan sehingga bagian dari sektor pertanian menurun sementara sektor industri (manufaktur dan jasa) meningkat, (Todaro, 1997:13-14)

Dalam pemikiran-tradisional, walaupun banyak varian pemikiran, pada dasarnya *key-word* dari pembangunan adalah pembentukan modal. Oleh karena itu, strategi pembangunan yang dianggap paling sesuai adalah akselerasi pertumbuhan ekonomi dengan mengundang modal asing dan melakukan industrialisasi. Tampak jelas, bahwa konsep dan strategi pembangunan semacam ini dijiwai oleh pengalaman negara-negara Eropa. Inilah yang disebut dengan *Euro-sentrism*, (Hettne, 1992)

Memasuki dasawarsa 1960-an, muncul kesadaran baru yang 'menggoyang' *euro-sentrism*. Banyak negara berkembang menyadari bahwa pertumbuhan tidaklah identik dengan pembangunan. Hal ini dipicu oleh kenyataan yang mereka alami bahwa dibalik pertumbuhan ekonomi yang tinggi, ternyata dibarengi dengan masalah-masalah seperti pengangguran, kemiskinan di pedesaan, distribusi pendapatan yang timpang, dan ketidakseimbangan struktural.

Hal tersebut di atas menjadi momentum dimulainya masa pengkajian ulang tentang arti pembangunan. Pada masa ini bermunculan paradigma baru dalam pembangunan, diantaranya: konsepsi pertumbuhan dengan distribusi, kebutuhan pokok (*basic needs*), pembangunan mandiri (*self-reliant development*), pembangunan berkelanjutan dengan

memperhatikan alam (*ecodevelopment*), serta pembangunan memperhatikan ketimpangan pendapatan menurut jenis etnis (*ethnodevelopment*), (Kuncoro, 1997: 7-14)

Kerancuan pengertian pertumbuhan ekonomi, pembangunan ekonomi dan pembangunan itu sendiri sebenarnya tidak terlepas dari dominannya pandangan yang menatap pembangunan dalam perspektif ekonomi semata. Padahal, pembangunan bukanlah sekedar masalah ekonomi, tetapi lebih luas dari itu. Pembangunan mempunyai dimensi yang lebih luas (sosial, politik, budaya dan lain-lain). Menurut Todaro (1997:16), *pembangunan* dimaknai sebagai suatu proses multidimensi yang melibatkan perubahan-perubahan dalam struktur sosial, sikap dan faktor kelembagaan, juga percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketidakadilan dan penghapusan kemiskinan absolut.

Pada hakikatnya, pembangunan harus berlangsung pada suatu tingkat perubahan secara menyeluruh sehingga suatu sistem sosial, yang telah diselaraskan dengan kebutuhan-kebutuhan dan keinginan dasar masing-masing pribadi dan kelompok yang beraneka ragam dalam sistem tersebut, akan bergerak menjauhi kondisi hidup yang secara umum dianggap kurang memuaskan, dan mengarah ke situasi atau kondisi hidup yang secara material dan spiritual dianggap 'lebih baik'. Tiga nilai dasar yang harus diperhatikan dalam pembangunan adalah: (1) *sustenance*, kemampuan untuk menyediakan kebutuhan dasar yang meliputi pangan, papan dan rasa aman; (2) *self-esteem*, kebutuhan untuk dihargai, yaitu suatu perasaan akan nilai atau martabat dan hormat terhadap diri pribadi, sehingga tidak dimanfaatkan semata-mata sebagai alat untuk mencapai tujuan orang lain; dan (3) *freedom from servitude*, kebebasan untuk dapat memilih. Kebebasan di sini hendaknya tidak dipahami dalam makna politik atau ideologi, melainkan dalam pengertian yang

lebih mendasar mengenai kebebasan atau emansipasi dari perampasan kondisi material kehidupan, dari penjajahan sosial atas manusia oleh alam, kebodohan, orang-orang lain, penderitaan, lembaga-lembaga dan keyakinan-keyakinan dogmatik.

KERANGKA KONSEPTUAL PEMBANGUNAN DUNIA KETIGA

Pada saat teori pembagian kerja internasional menjadi sebuah *grand theory*, maka negara-negara di dunia menspesialisasikan dirinya sesuai dengan keunggulan komparatif (*comparative advantage*) yang dimilikinya. Karena adanya spesialisasi ini, terjadilah perdagangan internasional yang menurut teori ini merupakan sarana yang dapat menguntungkan semua pihak yang terlibat didalamnya.

Rekomendasi lebih lanjut dari teori pembagian kerja secara internasional bahwa pembangunan yang paling baik bagi suatu negara adalah pembangunan yang meleburkan diri ke dalam kegiatan ekonomi dunia, karena pada dasarnya negara-negara yang ada saling tergantung, dan akan lebih menguntungkan bila negara-negara saling mengisi kelemahan yang ada.

Berdasarkan rekomendasi tersebut, maka di dunia terdapat dua kelompok besar negara sesuai dengan *comparative advantage*-nya, yaitu (1) negara-negara yang memproduksi hasil pertanian (*agricultural countries*), dan (2) negara-negara yang memproduksi barang-barang industri (*Industrial Countries*). Antara dua kelompok negara tersebut terjadi hubungan dagang dan keduanya, menurut teori diatas, saling menguntungkan. Namun, realita menunjukkan hasil yang berbeda. Neraca perdagangan selalu menguntungkan negara industri, sehingga negara-negara industri semakin kaya sedangkan negara-negara pertanian semakin jauh tertinggal.

Terhadap kenyataan tersebut, terdapat dua kelompok teori yang berusaha menjelaskannya, yaitu (1) Teori Modernisasi, yang memandang bahwa kemiskinan negara-negara pertanian disebabkan oleh faktor-faktor internal (dalam negeri); dan (2) Teori Struktural, yang memandang bahwa penyebab kemiskinan berasal dari faktor eksternal.

Menurut *Teori modernisasi*; keterbelakangan suatu negara disebabkan karena orang-orangnya/nilai-nilai yang hidup di masyarakat tersebut belum modern, sehingga tidak bisa mendukung proses pembangunan. Solusinya, mereka 'harus dibangun' dengan memperkenalkan nilai-nilai modern yang rasional dan sarana-sarana/modern untuk menopang pembangunan. Secara umum ciri-ciri dari teori modernisasi ialah (1) didasarkan pada dikotomi tradisional dan modern, (2) didasarkan pada faktor-faktor non material sebagai penyebab kemiskinan, khususnya dunia ide/alam pemikiran, (3) biasanya bersifat a-historis, hukum dianggap berlaku secara universal tanpa memperhatikan faktor waktu ataupun tempat, (4) faktor yang mendorong atau menghambat pembangunan harus dicari di dalam negara yang bersangkutan, bukan di luarnya.

Walaupun terdapat kesimpulan umum bahwa penyebab keterbelakangan adalah faktor internal, namun dalam menjelaskan faktor internal apa yang paling dominan penyebab keterbelakangan tersebut sangatlah beragam antara tokoh penganut teori modernisasi. Roy Harrod dan Evsey Domar menyebut kelangkaan tabungan dan investasi di negara berkembang sebagai penyebabnya, Mark Weber menyoal lemahnya semangat kerja keras dan sungguh-sungguh yang lepas dari motivasi imbalan material (spirit agama), David McClelland menyebut kurang tingginya semangat untuk berprestasi (*need for achievement/ n-ach theory*), WW. Rostow yang terkenal dengan *the five stages*

of *economic growth*-nya menekankan arti penting lembaga-lembaga non ekonomi (lembaga-lembaga sosial dan politik) yang mendukung proses pembangunan, Bert F. Hoselitz masih mempersoalkan masalah faktor-faktor non ekonomi tetapi lebih menekankan lembaga-lembaga yang konkret untuk menghimpun modal; memasok tenaga kerja teknis dan teknologi. Sementara itu, Alex Inkeles dan David H. Smith lebih menyoal masalah manusia sebagai komponen penting dari pembangunan dan merekomendasikan pendidikan sebagai sarana yang paling efektif untuk membentuk manusia modern.

Berbeda dengan teori modernisasi, dalam pandangan kaum struktural kemiskinan di negara dunia ketiga yang mengkhususkan diri pada produksi pertanian adalah akibat dari struktur perekonomian dunia yang eksploitatif, dimana yang kuat melakukan eksploitasi terhadap yang lemah. Interaksi negara industri-pertanian cenderung menguntungkan negara industri, bahkan lebih ironis lagi, telah terjadi transfer kekayaan dari negara miskin ke negara maju.

Teori struktural sebenarnya merupakan teori-teori yang memakai pendekatan struktural. Pendekatan ini menekankan lingkungan material manusia, yakni organisasi kemasyarakatan beserta sistem imbalan-imbalan material yang diberikannya, perubahan-perubahan pada lingkungan material manusia termasuk perubahan teknologi. Lingkungan material ini dianggap sebagai faktor yang lebih penting daripada keadaan psikologi dan nilai-nilai kemasyarakatan yang ada dalam mempengaruhi tingkah laku manusia.

Teori struktural seringkali dianggap bersumber pada teori yang dilontarkan oleh Karl Marx, terutama teorinya tentang bangunan bawah (*base*), dan bangunan atas (*superstructure*). Bangunan bawah adalah aspek material dari kehidupan manusia, bangunan atas adalah aspek non material-

nya. Kalau bangunan bawahnya berubah, bangunan atas juga akan mengikutinya. Maka, dalam teori ini aspek materi menjadi lebih penting daripada aspek ide; filsafat materialisme memang menjadi dasar dari teori Marx. Berkait dengan interaksi negara pertanian-industri, Raul Prebisch (1950) menyatakan kritiknya terhadap perdagangan dunia yang bebas serta menyoal tentang hambatan industri, dan karena itu juga hambatan terhadap pembangunan, disebabkan oleh faktor-faktor eksternal. Prebisch menunjuk penurunan nilai tukar dari komoditi pertanian terhadap komoditas barang industri sebagai penyebabnya. Oleh karena itu, ia menyatakan bahwa negara yang terbelakang harus melakukan industrialisasi, bila mau membangun dirinya.

Sejalan dengan rekomendasi Prebisch, teori perubahan struktural menitikberatkan pembahasan pada mekanisme transformasi ekonomi yang dialami oleh negara sedang berkembang (NSB), yang semula lebih bersifat subsisten dan menitikberatkan pada sektor pertanian menuju ke struktur perekonomian yang lebih modern, dan sangat didominasi oleh sektor industri dan jasa. Dua tokoh utama teori struktural ini ialah Arthur Lewis dengan teori migrasinya, berupa arus perpindahan tenaga kerja dari sektor pertanian subsisten menuju sektor industri modern; serta Hollis Chenery dengan teori transformasi strukturalnya yang menyatakan bahwa seiring dengan peningkatan pendapatan per kapita maka perekonomian suatu negara akan bergeser dari pertanian ke industri.

Masih berkaitan dengan interaksi negara pertanian-industri, muncul sebuah pendekatan baru yang berbeda dari kaum strukturalis, yaitu *Teori Ketergantungan (Dependentsia Theory)*. Orang-orang yang sangat berpengaruh dibalik teori ini adalah Paul Baran, Andre Gunder Frank, Theotonio Dos Santos, Fernando Henrique Cardoso, dan Peter Evans.

Pokok-pokok pemikiran yang dilontarkan para penganut dependensia ialah: (1) yang menjadi hambatan dari pembangunan bukanlah kelangkaan modal, melainkan pembagian kerja internasional yang terjadi, (2) pembagian kerja internasional diuraikan menjadi dua kawasan, yaitu pusat dan pinggiran; dimana terjadi pengalihan surplus dari pinggiran ke pusat, (3) akibat pengalihan surplus ini negara-negara pinggiran kehilangan sumber utamanya yang dibutuhkan untuk membangun negerinya, (4) sebagai terapinya, teori ketergantungan menganjurkan pemutusan hubungan dengan kapitalisme dunia, dan mulai mengarahkan dirinya pada pembangunan yang mandiri.

Rumusan yang diberikan kaum dependensia, yang merupakan perspektif baru dalam menjelaskan interaksi negara pertanian-industri, ternyata mendapat sambutan yang sangat ramai. Hal ini dapat dilihat dari begitu banyak kritik yang dialamatkan kepada teori tersebut, antara lain yang disampaikan Robert A. Packenham (1974), Christopher Chase-Dunn (1975). Kritik utama terhadap teori dependensia adalah bahwa tesis dependensia sangat menitikberatkan keterbelakangan yang terjadi akibat interaksi negara maju dan miskin di dunia. Sementara kritik lainnya adalah bahwa teori dependensia tidak lebih dari sekadar tesis yang hanya mampu mengumpulkan sebab-sebab terjadinya keterbelakangan dan ketergantungan semata tanpa mampu mencarikan solusi jalan keluarnya. Sampai saat ini solusi yang ditawarkan dependensia cenderung untuk melakukan isolasi terhadap pengaruh luar; solusi ini tidak realistis dalam globalisasi dan perkembangan pesat arus komunikasi.

Perdebatan seru tentang teori dependensia, baik yang pro maupun yang kontra, mengilhami munculnya perspektif-perspektif baru pembangunan; dengan demikian teori-teori yang muncul semakin semarak. Teori-teori ini biasanya dikelompokkan dalam perspektif besar dengan nama *Teori Pasca*

Ketergantungan. Memang, teori-teori yang lahir pada era ini merupakan kelanjutan dari perdebatan masa teori dependensia. Teori-teori tersebut dapat disebutkan diantaranya: (1).Teori Liberal, (2).Teori Bill Warren, (3).Teori Artikulasi, (4).Teori Sistem Dunia.

Teori Liberal, mempersoalkan ketajaman definisi dari teori ketergantungan. Definisi yang ada dianggap terlalu kabur, sulit dijadikan sesuatu yang operasional. Tanpa kejelasan dan ketajaman konsep-konsep, teori ketergantungan lebih merupakan sebuah retorika-bahasa, bukan sesuatu yang ilmiah.

Teori Bill Warren, mengkritik teori ketergantungan dengan menunjukkan realitas bahwa negara-negara yang tergantung menunjukkan kemajuan dalam pertumbuhan ekonomi dan proses industrialisasinya. Anggapan adanya keterbelakangan di negara-negara pinggiran hanya merupakan ilusi belaka. Bagi Warren, tidak bisa dicegah lagi bahwa kapitalisme akan berkembang dan menggejala di semua negara di dunia. Baru setelah kapitalisme berkembang sampai mencapai titik jenuhnya, perubahan ke sosialisme dimungkinkan.

Teori Artikulasi, berpangkal tolak sama dengan Warren, yaitu ketidakpuasan terhadap teori ketergantungan. Teori ini dikembangkan oleh Claude Mellissoux dan Pierre Philippe, bertitik tolak dari konsep formasi sosial. Penganut teori ini menyatakan bahwa pembangunan dan industrialisasi secara empirik memang terjadi di negara-negara terbelakang. Kapitalisme di negara-negara pinggiran tidak bisa berkembang karena artikulasinya, atau kombinasi unsur-unsurnya, tidak efisien. Ada banyak unsur penghambat. Kalau kapitalisme bisa dibiarkan berkembang secara murni, dia pasti akan berhasil, tak peduli dia berkembang di negara-negara pusat atau pinggiran. Dengan demikian, keterbelakangan di negara-negara dunia ketiga harus dilihat sebagai kegagalan dari kapitalisme untuk berfungsi secara murni, sebagai akibat dari

adanya cara produksi lain di negara-negara tersebut.

Teori Sistem Dunia, dimunculkan oleh Immanuel Wallerstein sebagai reaksi ketidakmampuan dependensi menjelaskan gejala pembangunan di dunia ketiga; yang bisa dijelaskan hanyalah gejala terjadinya keterbelakangan (sama dengan dengan warren dan teori artikulasi). Bagi Wallerstein, dinamika sistem dunia, yakni kapitalisme global, selalu memberikan peluang bagi negara-negara yang ada untuk naik atau turun kelas. Sistem dunia yang dulu memberi keunggulan pada negara-negara penghasil komoditas primer, pada saat lain keunggulan ini beralih pada negara-negara yang mengembangkan industrinya. Sistem dunia ini juga yang kemudian memberi kesempatan kepada negara-negara pinggiran yang sudah relatif siap untuk melakukan produksi barang-barang industri yang sederhana, pada saat produksi barang-barang ini sudah tidak menguntungkan lagi di negara-negara pusat.

Bila kita amati, bermunculannya teori-teori pasca teori ketergantungan mempunyai corak yang hampir sama yaitu menolak pendekatan revolusioner sebagai salah satu pemecahan eksploitasi negara negara pusat terhadap pinggiran, sebagaimana direkomendasikan teori ketergantungan. Nampaknya, fenomena ini merupakan 'kebangkitan' kembali kaum Neo-klasik dengan teori penawaran-nya (*Supply Side Theory*). Rekomendasi yang diberikan kepada negara berkembang adalah mengurangi campur tangan pemerintah dalam perekonomian melalui swastanisasi BUMN, meningkatkan peran perencanaan dan penetapan regulasi ekonomi yang menciptakan iklim yang kondusif bagi peningkatan peran swasta dalam pembangunan.

BEBERAPA IMPLEMENTASI MODEL PEMBANGUNAN

Bukanlah pekerjaan yang mudah untuk

dapat melakukan kategorisasi model pembangunan yang diterapkan oleh negara-negara di dunia, Namun bila diskemakan model-model yang telah *binen (established)* di dunia, maka akan kita dapati empat model pembangunan yang paling menarik dan menonjol, yaitu: (1) Model *Welfare State* (2) model negara kemakmuran (3) Model *Populis* (4) sistem neo-liberalisme (*Damanhuri*, 1996: 32-40)

Model Welfare State. Yaitu model pembangunan ala negara-negara Skandinavia (Swedia, Finlandia, Denmark) dan negara-negara dimana partai sosialis memerintah atau warna kemasyarakatannya mengadopsi aspirasi kaum sosial-demokrat, seperti Perancis, Spanyol, Jerman dan Inggris. Beberapa ciri menonjol dari model ini ialah: (1)Sistem perpajakan yang sangat progresif bersamaan dengan sistem jaminan sosial yang sangat efektif untuk melindungi lapisan sosial yang lemah, yang semua ini merupakan hasil dari "regulasi sosial" yang cerdas oleh negara dalam konteks historis yang spesifik, proses yang kompleks, serta berbagai hasil transformasi gradual dan evolutif serta dengan waktu yang panjang; (2)Aktor swasta sebagai agen pertumbuhan ekonomi yang efisien dimana mekanisme pasar sepenuhnya menyampaikan sinyal-sinyal yang memberikan arah untuk pengambilan keputusan bagi kalangan swasta, tanpa adanya ruang terdistorsi oleh perilaku birokrasi atau aktor negara; (3)Kekuatan politik serikat buruh yang sangat menentukan, berdampingan dengan sistem demokrasi parlementer yang efektif, dengan terdapatnya partai-partai yang memerintah dan partai oposisi sehingga terjamin proses "*check and balance*" dalam rangka merealisasikan hak-hak politik dan kepastian hukum bagi setiap warga negara.

Model Welfare State ini telah menjadi obsesi yang kuat bagi para pendiri

Republik Indonesia dengan Bung Hatta sebagai figur sentralnya. UUD 1945 mengandung semangat ke arah model ini.

Model Negara Kemakmuran ala Jepang. Model kedua ini memiliki ciri-ciri: (1) Negara menjadi sentral dalam penentuan keputusan-keputusan jangka panjang; pertumbuhan ekonomi, konsensus antar lembaga, pengembangan teknologi dan seterusnya. Dan ia melakukan sangat sedikit campur tangan dalam tingkat pelaksanaannya. Swastalah yang sepenuhnya menjabarkan dan merealisasikan keputusan-keputusan jangka panjang tersebut; (2) Kemitraan negara/ birokrasi dengan kaum wiraswasta dalam rangka merebut asar dunia; (3) Sistem subsidi untuk kebutuhan pokok menjamin secara efektif proses redistribusi kepada para petani serta kelas-kelas sosial yang rendah lainnya dari hasil-hasil pertumbuhan ekonomi, terutama mengulang model barat dalam proses industrialisasi, praktik manajemen sumberdaya manusia dan pengembangan iptek mereka; (4) Hampir tidak signifikan peran serikat buruh dalam proses pengambilan keputusan ekonomi politik, tapi dikompensasi oleh proses mikro perusahaan dalam bentuk konsultasi reguler, mulai dari yang sifatnya harian, mingguan, bulanan, dan seterusnya, yang inheren dalam sistem. "bekerja seumur hidup" (loyalitas bagi pekerja perusahaan). Pada gilirannya sistem ini menjamin tingkat kesejahteraan buruh serta tingkat *full employment* dalam sistem ekonomi keseluruhan. Patut dicatat bahwa Jepang hingga kini dikenal sebagai negara yang paling rendah tingkat "keluar masuk perusahaan" dan tingkat pengangguran di dunia.

Model Populis ala negara-negara komunis, khususnya yang dianggap unik adalah RRC pra reformasi. Ciri-ciri penting dari model ini ialah: (1) *Hard policy* untuk memaksa masing-masing aktor ekonomi "memperoleh sesuai dengan kebutuhannya" dengan pembangunan besar-besaran sistem

komune dalam rangka sistem *langsung (direct system)* untuk pemecahan masalah-masalah ledakan penduduk, *under employment*, dan kemiskinan massal; (2) Sistem monopoli pengambilan keputusan oleh sekelompok kecil komite sentral partai dengan penutupan total hak berbeda dalam menentukan arah dari semua subsistem kenegaraan; (3) Peran yang sangat besar dan sangat menentukan dari aparat represi dan kontrol politik untuk menjamin efektifnya sistem mereka.

Patut dicatat RRC pra reformasi telah mengalami keberhasilan relatif dalam menciptakan kesempatan kerja penuh dan menekan sekecil-kecilnya tingkat ketimpangan (kemiskinan relatif) dan jumlah penduduk dibawah garis kemiskinan (kemiskinan absolut), meski harus dibayar dengan biaya sosial dan politik yang mahal dengan dikuburnya baik dalam pengertian fisik maupun nonfisik hak-hak individu untuk kepentingan sistem kolektivisme mereka.

Sistem Neo-Liberalisme dengan regulasi ekonomi dan sosial oleh kalangan swasta ala *Reaganomic* pada pemerintahan Reagan-Bush di Amerika Serikat. Ciri-ciri penting dari sistem ini ialah: (1) Kepercayaan penuh kepada mekanisme pasar atau sektor swasta, baik dalam rangka menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pengembangan teknologi dan penciptaan kesempatan kerja. Sementara itu pemecahan masalah kemiskinan dan orang-orang marjinal lainnya di luar sistem produktif, dilakukan oleh lembaga-lembaga karitatif yang dibangun oleh kaum pengusaha, politisi dan yayasan-yayasan sosial; (2) Peran negara dibatasi dalam minimum peran tradisionalnya sebagai penjaga pertahanan keamanan, atau paling jauh sebagai peran korektif ketidaksempurnaan pasar; semisal dalam melanjutkan (karena telah tercipta jauh sebelum Reagan memerintah) sistem "*anti-trust*" untuk mencegah monopoli dan kartelisasi; (3) Politik fiskal (pajak yang rendah misalnya) dan moneter (bunga yang rendah misalnya) serta

sistem insentif lainnya dalam rangka memacu sektor swasta dalam melakukan perannya secara maksimal; (4). Pemotongan subsidi sistem *welfare state* (misalnya jaminan kesehatan untuk kelompok rendah, penganggur dan seterusnya) yang dianggap menciptakan kemalasan kelas sosial yang rendah tersebut.

Sistem neo-liberalisme ini antara lain telah menghasilkan 20-40 persen penduduk Amerika di bawah garis kemiskinan (menurut statistik resmi AS sendiri); ini merupakan persentase terbesar dalam sejarah Amerika.

KRISIS PEMBANGUNAN

Bila diamati proses pembangunan negara-negara di dunia, tampaknya dunia saat ini sedang mengalami krisis pembangunan (baik di negara maju, transisi maupun terbelakang). Hal ini berpangkal dari ketidakberhasilan negara-negara di dunia mencapai tujuan-tujuan pembangunan yang telah jauh-jauh dicanangkan sebelumnya.

Di negara-negara dunia pertama, Eropa Barat dan Amerika Utara, yaitu negara-negara yang masuk kategori negara maju dan selama ini menjadi gudangnya konsepsi pembangunan, ternyata tak luput diterpa krisis pula, walaupun tidak separah negara sosialis ataupun negara berkembang. Krisis di sini berpangkal dari ketidakberhasilan Barat dalam mencapai *welfare state* (negara kesejahteraan). Kinerja pembangunan yang tampak dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi ternyata tidak mampu menjawab tantangan disparitas distribusi pendapatan, ditandai dengan angka pengangguran yang semakin meningkat dari tahun ke tahun, (Hettne, 1992: 16-18). Jika diamati, barangkali hanya Swedia yang mendapat perkecualian, karena negara ini dapat dikatakan mampu mendekati negara kesejahteraan.

Sementara itu, krisis yang paling mencolok dialami oleh negara-negara dunia kedua yang menganut sistem sosialis. Krisis yang terjadi disini pada umumnya berkisar

pada sekitar masalah pertumbuhan ekonomi. Sistem sosialis yang ada tampaknya gagal mendorong berkembangnya faktor produksi dalam perekonomiannya, sementara birokrasi pemerintah makin membengkak. Tak heran bila kemudian terjadi reformasi besar-besaran di negara-negara sosialis ini, misalnya: Rumania, Cekoslovakia, Hongaria, Polandia, Jerman Timur, Uni Soviet dan Yugoslavia. Mungkin hanya Cina yang dapat dikatakan mampu mengelak dari fenomena perubahan sistem politiknya, walaupun demikian sulit dikatakan bahwa Cina masih tetap sebagai negara sosialis; karena Cina telah mengalami perubahan-perubahan yang sangat mendasar.

Krisis yang terjadi di negara dunia ketiga memiliki perbedaan mendasar dibandingkan sebelumnya, karena sifatnya multi-kompleks. Bukan saja masalah kelaparan (terutama Afrika), kesenjangan antara kaya dan miskin, melainkan juga benturan-benturan agama dan rasial (terutama Asia). Ditambah lagi masalah utang yang semakin membengkak, serta kegagalan untuk berperan secara berarti dalam persaingan ekonomi di pasar global. Di negara-negara ini bukan saja ragam krisinya yang bermacam-macam, melainkan derajat intensitas krisis tersebut juga sangat mendalam.

Dalam aspek yang lain, krisis institusi kenegaraan sebagai agen yang menerapkan strategi pembangunan nampaknya juga terjadi secara global. Kegagalan pasar yang seharusnya dapat ditanggulangi dengan adanya campur tangan pemerintah dalam perekonomian, pada kenyataannya campur tangan pemerintah tersebut justru semakin mendistorsi pasar bukannya semakin mengefisienkan pasar sebagaimana yang diharapkan.

Ketika semua negara di dunia sedang menghadapi krisis, pada saat yang sama kita belum menemukan model pembangunan mana yang terbaik bagi kehidupan masa depan. Kalau negara maju saja ternyata tak bisa mengelak dari krisis dan belum mampu me-

nemukan solusi yang paling jitu, padahal mereka selama ini diposisikan sebagai "gurunya" pembangunan, lantas bagaimana dengan nasib negara berkembang. Sebagai seorang "murid" yang baru "sakit" apakah selayaknya harus selalu bergantung dan menunggu diagnosis dan obat mujarab (*panacea*) dari "gurunya", padahal pada saat yang sama "guru" tersebut juga sedang "sakit" dan juga belum mampu menemukan obatnya.

Teori pembangunan yang didasarkan pada pengalaman pembangunan dan paradigma berpikir Barat, ternyata banyak menemui kegagalan dalam implementasinya di negara berkembang. Asumsi-asumsi dasar yang digunakan dalam teori pembangunan, ternyata hanya merupakan asumsi-asumsi yang tepat berlaku di negara-negara Barat. Pengadopsian secara mentah-mentah konsep pembangunan Barat telah membawa negara berkembang menggunakan suatu alat yang tidak sesuai dan sepadan dengan apa yang hendak dibangun/diperbaiki. Padahal, seperti kita ketahui, kondisi negara berkembang sangat berbeda dengan Barat, jauh lebih kompleks dan rumit yang tentu saja memerlukan pendekatan yang berbeda pula.

MEMBANGUN PERSPEKTIF ALTERNATIF: MENEROBOS STATUS QUO

Ketika pertemuan Bretton Woods (USA) usai serta menghasilkan berdirinya dua lembaga yang diharapkan dapat mempengaruhi pembangunan dunia, yaitu *International Reconstruction and Development* (IBRD, kemudian dikenal dengan Bank Dunia) dan *International Monetary Fund* (IMF), 44 negara peserta optimis untuk menata sebuah dunia yang damai, bebas dari kemiskinan dan perang antar sesama manusia. Tetapi apa yang terjadi kemudian? Tampaknya, sampai saat ini dunia masih dilanda oleh persoalan yang sama, yaitu kemiskinan, perang, serta kerusakan lingkungan.

Usaha menemukan model pembangunan dunia terus dilakukan banyak ahli. Salah satunya apa yang ditawarkan oleh Jeremy Rifkin dengan konsep yang dinamakan *Politik Biosfir*. Konsep politik biosfir ini tidak didasarkan pada negara kebangsaan secara terpisah-pisah, tetapi pada bumi sebagai satu kesatuan. Keamanan setiap negara kebangsaan bukan ditentukan melalui jalan masing-masing negara berusaha memperkuat dirinya, melainkan melalui pemeliharaan bersama bumi ini. Hanya dengan pemeliharaan bersama inilah kita juga sekaligus memelihara masa depan masing-masing, baik sebagai individu maupun sebagai bangsa. (Rifkin: 1991: 95-141, dalam Budiman, 1995: 117-118)

Tetapi, tampaknya dunia sekarang masih dikuasai oleh konsep lama dari ekonomi persaingan bebas. Setiap orang, setiap negara, masih sibuk bersaing untuk mendapatkan harta benda sebanyak-banyaknya untuk mengamankan dirinya di masa depan. Berakhirnya Putaran Uruguay dalam rangka program perundingan badan PBB tentang tarif dan perdagangan internasional (GATT), semakin memperkuat sistem persaingan bebas ini, dengan korban dunia Ketiga yang selalu diperlakukan sebagai sapi perah oleh negara-negara maju.

Bila dicermati, tampaknya berbagai permasalahan yang muncul dibalik pembangunan negara berkembang banyak dipicu dari paradigma pembangunan yang selama digunakan, yaitu paradigma yang diimpor dari Barat. Sementara itu, Barat tampaknya juga semakin menunjukkan 'taringnya' agar dapat terus dapat mempertahankan momentum ini; bahkan, bila perlu, melalui kesepakatan-kesepakatan global yang seolah menjanjikan masa depan dunia yang lebih cerah tak terkecuali bagi negara dunia ketiga. Benarkah ini semua?

Sangat menarik apa yang dikemukakan David Korten berkaitan dengan fenomena ini. Ia berpendapat bahwa apa yang dilakukan orang sekarang, adalah mengobati penyakit

baru dengan resep lama. (Korten 1990:21-22, dalam Budiman, 1995: 118-119). Dengan demikian, sangatlah mungkin bahwa penyakit-penyakit pembangunan yang sudah sedemikian resisten terhadap resep-resep lama tersebut suatu saat akan muncul kembali dengan tingkat resistensi lebih tinggi.

Untuk itu, sangat mendesak bagi negara-negara dunia ketiga agar segera melakukan langkah-langkah dekonstruksi (pembongkaran) terhadap paradigma pembangunan, untuk keluar dari keterjebakan lingkaran setan pembangunan dunia dan sekaligus melakukan rekonstruksi bagi munculnya paradigma baru yang cocok bagi negara-negara berkembang.

Langkah dekonstruksi ini harus dapat menyentuh aspek-aspek dasar yang selama ini menjadi 'biang' masalah pembangunan. Dengan demikian, baik dekonstruksi yang bersifat epistemologis maupun praksis tampaknya harus dilakukan secara bersama-sama. (Damanhuri, 1996: 192-197)

Dekonstruksi epistemologis mendesak untuk dilakukan karena teori-teori pembangunan dari barat yang selama ini dianut, dibangun ketika rasionalitas total yang dibangun oleh *sekularisme* yaitu ideologi yang memisahkan (sekaligus terlepasnya wacana) agama (gereja) dengan negara dan kehidupan masyarakat; yang pada gilirannya amat mempengaruhi konstruksi; baik dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun praksis pembangunan. Dominasi rasionalitas ini memang telah membawa sifat positif terhadap rekayasa sosial yang menuntut penciptaan masyarakat yang '*egalitarian*'; tetapi, ongkos sosial yang dibayar sangatlah mahal, diantaranya berupa rontoknya nilai luhur keluarga, sekaligus 'menyingkirkan' berbagai struktur sosial yang bersifat 'konsensus' (kekeluargaan). Implikasi selanjutnya adalah membawa tuntutan dan praktik yang menempatkan materialisme sebagai dasar rekonstruksi sosial.

Kondisi di atas, menyiratkan bahwa dekonstruksi terhadap epistemologis teori-

teori pembangunan yang diadopsi selama ini sudah sangat urgen dilakukan. Bila aspek epistemologis belum terbongkar, niscaya kita akan tetap dalam lingkungan 'keseimbangan yang semu' sebagaimana berlangsung sekarang ini. Yakni, dengan segala manifestasinya, seperti semakin maraknya sikap materialisme serta semakin membudayanya orang meraih harta dengan menghalalkan segala cara.

Selain yang bernuansa epistemologis, **dekonstruksi praksis pembangunan** mendesak pula untuk dilakukan. Hal ini dilatarbelakangi bahwa asumsi modernisme yang dilandasi *mainstream economy* adalah dengan mengasumsikan bahwa negara-negara berkembang tidak memiliki sumberdaya kuat, baik dalam rasionalitas maupun material/modal untuk melangsungkan pembangunannya. Sehingga dibutuhkan mutlaknya '*air for development*' berupa transfer budaya rasional (modernisme) serta modal dari negara-negara Barat. Lebih jauh bahkan premis yang dominan dalam wacana Barat adalah bahwa penduduk negara-negara berkembang dianggap bersifat malas, anti-kemajuan, tidak suka menabung dan seterusnya. Karena itu, mereka menganggap perlunya transfer mentalitas '*idea of progress*'. Tapi, benarkah semua itu ?

Kenyataan terhadap anggapan yang diuraikan diatas merupakan praksis pembangunan yang dilatarbelakangi oleh dominasi epistemologi teori-teori *mainstream* yang telah diadopsi dari Barat. Sehingga, dekonstruksi epistemologis harus diiringi dengan dekonstruksi dalam praksis pembangunan.

Terhadap paradigma-paradigma pembangunan Barat, kita jarang sekali yang mencoba menguji keabsahan sebuah teori, apalagi mau mencoba memakai kerangka pemikiran di luar arus utama. Padahal, teori arus utama merupakan hasil refleksi dari akumulasi pengalaman sekelompok bangsa, maka dengan demikian keabsahannya pun tidak selalu relevan bagi sekelompok bangsa yang lain. Ini bisa terjadi karena konteks kesejarahan be-

serta struktur politik antara negara-negara (yang lebih dulu) maju dengan negara-negara berkembang, memiliki banyak sekali perbedaan. Dengan demikian, kita dapat saja melakukan pendekatan eklektik (*eclectic*), yaitu tidak mau konsisten mengikuti satu paradigma saja. Kita tidak harus menjadi penganut aliran liberal atau sosialis misalnya. Dengan kata lain, sangat diperlukan adanya sifat-sifat kritis yang nantinya dapat melahirkan pemikiran-pemikiran alternatif. Melalui sikap yang heterodoks (*bukan ortodoks*), yaitu menyebel dari paradigma dan teori besar (*grand theory*) yang mapan. Atmosfir yang demikian sangat memungkinkan bagi kemunculan konsepsi-konsepsi baru tanpa harus "silau" pada pada kebesaran teori yang sudah *establish*.

Ada baiknya kita mengenal model-model pembangunan "Non-Barat" di luar komunis, yaitu: (1). model pembangunan "autarki" (keterlibatan yang relatif kecil dari modal asing) dengan contoh utama Srilangka dan Tanzania; (2). model pembangunan "wakil dari proyek besar-besaran demokrasi ala Barat" yakni dengan contoh utama India dan banyak negara Amerika Latin; (3). "model pembangunan non-Barat dalam skema terbuka terhadap kerjasama Barat" (termasuk modal asing) dengan contoh utama diwakili oleh preseden historis Jepang yang disusul oleh Taiwan, Korea Selatan dan Negara Industri Baru Asia lainnya, (Damanhuri, 1996: 82-83)

Model pertama dikenal paling berhasil dalam kinerja pembangunan sosial, terutama diukur oleh *Physical Quality of Life Index (PQLI)* diantara warga dunia ketiga pada dekade tujuh puluhan. Tapi mereka akhirnya gagal akibat salah satu faktornya yakni tidak piawinya dalam manajemen makro ekonomi dan hilangnya opportunity dalam sinergi ekonomi internasional termasuk dalam bidang finansial.

Model kedua menunjukkan keberhasi-

lan dalam kinerja industrialisasi secara lebih dini di dunia ketiga, tetapi akhirnya gagal juga dalam memecahkan problem kemiskinan massal dan terjerat oleh problem utang luar negeri (*debt trap*). Salah satu penyebabnya adalah justeru akibat integrasi kelewat antusias dalam segala bidang dengan skema Barat termasuk format demokrasi politik serta dalam integrasi finansial, disamping hampir terbaiknya pembangunan pertanian.

Model ketiga, dalam periode awal pembangunannya justeru terpuruk banyak masalah termasuk korupsi besar-besaran dan problem politik (oligarki kekuasaan maupun finansial), tetapi secara perlahan semakin *performance* dalam ekonomi dan belakangan dalam proses demokratisasi bahkan semakin menjadi "*less-dependent-countries*" secara keseluruhan termasuk dalam sektor finansial.

Setelah memperoleh ilustrasi ketiga model pembangunan diatas, apakah dengan demikian model pembangunan terbaik yang seharusnya diaplikasikan di negara dunia ketiga adalah model pembangunan yang ketiga? Jawabannya tentu saja tidak. Setiap negara mempunyai kekhasan sendiri-sendiri yang berbeda dengan negara lain. Penggalan nilai-nilai yang khas untuk kemudian menjadi sinergi bagi pembangunan negara yang bersangkutan inilah yang ingin dikemukakan. Model pembangunan Jepang yang mampu mengantarkan Jepang mensejajarkan diri dengan negara maju lainnya di dunia, tidak serta merta dapat diadopsi dan diaplikasikan begitu saja, hanya saja kita dapat belajar dibalik keberhasilan tersebut. Yang menarik, bahwa pelajaran penting dari keberhasilan model ketiga di atas adalah salah satunya justeru diawali kemampuan mereka dalam mensintesis kerangka struktur sosial dan kultural tradisional dengan produk kemajuan Barat dan perhatiannya secara intensif dan amat dini dalam pembangunan pertanian termasuk dalam reformasi agraria serta penyerangan secara langsung terhadap

problema kemiskinan.

Pola *eklektik-heterodoks* pada intinya menghindari perlakuan yang bersifat doktriner—yang menolak atau menerima sebuah teori/model tanpa sikap kritis-selektif—seraya menggunakan suatu pemikiran tertentu dari model pemikiran manapun sepanjang mampu menjelaskan, memprediksi dan memberi kegunaan kepada masyarakat banyak. Dalam hal ini termasuk penggunaan suatu “kearifan tertentu” yang berasal dari nilai lokal/domestik yang meski belum baku dan sistematis, tapi punya daya-daya menjelaskan, prediktif dan bahan solusi.

Sejarah negara maju—baik yang berasal dari Amerika, Eropa, Asia atau manapun—ketika pada masa-masa awal membangun dirinya tidaklah harus kita artikan dalam kategori *deterministik-historis*, yakni kepercayaan akan adanya semacam siklus keharusan berulangnya sebuah peristiwa lalu. Kesadaran sejarah yang di butuhkan adalah yang mampu melahirkan *nasionalisme pembangunan* khas negara berkembang masing-masing di tengah-tengah percuturan, mencari teori dan strategi baru, serta hiruk-pikuknya masing-masing negara dalam menemukan format yang sesuai dalam struktur perekonomian global saat ini.

Dunia Ketiga, seperti puteri cantik yang masih tertidur, menunggu seorang Pangeran Ganteng dari dunia Barat untuk membangunkannya melalui sebuah ciuman atau dengan sebilah pedang, sehingga sebuah proses pembangunan yang dinamis bisa terjadi.

(Blomstrom & Hetne, 1984)

¹ Fenomena kebangkrutan ekonomi ataupun penjadwalan utang ini merupakan sebuah kulminasi balik dari konsep pembangunan dengan menggunakan modal asing sebagai solusi kelangkaan modal dalam negeri. Kondisi ini juga dapat dipandang sebagai sebuah ironi dari pembangunan, yang ternyata tidak selalu menjanjikan hari esok yang lebih baik dari kemarin, bahkan sangat mungkin yang terjadi adalah kondisi yang sebaliknya.

² Yang dimaksud dengan ramifikasi adalah menyangkut pengaruhnya yang meluas secara bercabang-cabang dari berbagai ragam kegiatan.

³ Bahasan dalam bagian ini merupakan sebuah penjelajahan singkat dan ringkas dari teori-teori pembangunan dengan mengikuti pola kajian Arif Budiman (1992) dalam Teori Pembangunan Dunia Ketiga. Pola kajian tersebut berusaha dikomparasikan dan dilengkapi dengan pola-pola kajian yang lain untuk dapat saling mengisi kelemahan yang ada, yaitu: Ebenstein, Fogelman and Jemadu (1985) *Today's Isms*, Norman Gemmell (1987) *Surveys in Development Economics*, Richard Poinfret (1997) *Development Economics*, Gillis, Perkins, Roemer and Snodgrass (1992) *Economics of Development*, Todaro (1997) *Economics Development*, Suwarsono dan Alvin Y. So (1991) *Perubahan, Sosial dan Pembangunan di Indonesia: Teori-teori Modernisasi, Dependensi, dan Sistem Dunia*, Sumitro Djoghodikusumo (1994) *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, Lincoln Arsyad (1997) *Ekonomi Pembangunan*, Mudrajad Kuncoro (1997) *Ekonomi Pembangunan*.

⁴ Bahkan, saat ini terjadi penurunan percepatan pembangunan di negara-negara dunia pertama ini secara relatif terhadap negara-negara industri baru. Disamping itu dunia juga mencatat bahwa pada tahun 1985 Amerika Serikat pernah menjadi negara yang mempunyai hutang luar negeri terbesar di dunia, yaitu US\$ 750 milyar.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincolin, (1997), *Ekonomi Pembangunan*, Edisi ke-3, Yogyakarta, BP STIE YKPN
- Budiman, Arif, (1995), *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama
- Damanhuri, Didin S. (1996). *Ekonomi Politik Alternatif: Agenda Reformasi Abad 21*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan
- Djojohadikusumo, Sumitro, (1994). *Perkembangan Pemikiran Ekonomi: Dasar Teori Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan*, Jakarta, LP3ES
- Ebenstein-William, Fogelman-Edwin and Jemadu-Alex, (1985), *Today's Isms*, ninth edition, Prentice-Hall, Inc.
- Gemmell, Norman (editor), (1987), *Survey in Development Economics*, Basil Blackwell Ltd, Oxford, UK.
- Gillis-Malcolm, Perkins-Dwight H, and Snodgrass-Donald, (1992), *Economics of Development*, Third Edition, New York, WW Norton&Company, Inc
- Hettne, Bjorn, (1992), *Development Theory and the Three World*, New York, Longman Scientific and Technical
- Kuncoro, Mudrajad, (1997), *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan*, Yogyakarta., UPP AMP YKPN
- Pomfret, Richard, (1997), *Development conomics*, Prentice Hall Europe.
- Soule, George, *Ideas of The Great Economists*, New York, The New Amreican Library of World Literature, Inc
- Sukirno, Sadono, (1985). *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan*, Jakarta, LPFE UI
- Suwarsono dan Alvin Y. So, (1991), *Perubahan Sosial dan Pembangunan di Indonesia: Teori-teori Modernisasi, Dependensi dan Sistem Dunia*, Jakarta, LP3ES
- The World Bank, (1997), *World Development Report 1997: The State in A Changing World*, New York, Oxford University Press, Inc
- Todaro, Michael P, (1992). *Economics for a Developing World: An Intoduction to Principles, Problem and Policies for Development*.
- Todaro, Michael P, (1997). *Economic Development*, Sixth Edition, England, Addison Wesley Longman Limited